

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu tentang penerapan SAKIP, penyusunan LAKIP dan capaian kinerja kegiatan pada instansi barantan sebagai berikut;

- a. Secara umum, Barantan sebagai instansi pemerintah setingkat Eselon I telah menerapkan SAKIP meskipun belum sepenuhnya sesuai pedoman dari LAN, sedangkan unit kerja Eselon II belum menerapkan SAKIP baik dalam penyusunan Renstra, LAKIP maupun pengukuran kinerja. Hal ini karena belum ada pedoman dari pimpinan Barantan sebagai pernyataan komitmen penerapan SAKIP.
- b. Rencana Strategis (Renstra) yang disusun Eselon I Barantan belum sepenuhnya tepat, yaitu rumusan tujuan yang ditetapkan belum menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun 2004 (akhir periode Renstra). Selain itu perumusan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan belum sistematis sesuai tahapan analisis lingkungan strategis, uraian sasaran yang ditetapkan tidak jelas keterkaitannya dengan tujuan dan kebijakan serta belum dilengkapi dengan rumusan indikator sasaran secara kuantitatif. Sebanyak 3 butir dari 10 butir sasaran yang kurang tepat karena

merupakan kewenangan instansi lain, sehingga akan mengalami kesulitan dalam pengukurannya.

- c. Sistem pengukuran kinerja belum diselenggarakan dengan baik, yaitu belum ditetapkannya pedoman yang mengatur sistem pengukuran capaian kinerja secara sistematis berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi pembentukan tim kerja, penetapan indikator kinerja kegiatan dan sasaran, pembuatan instrumen pengumpulan data, pengumpulan data dan cara pengukuran kinerja. Dalam hal ini, LAKIP yang disusun belum menyajikan capaian kinerja kegiatan melainkan terbatas pada capaian kinerja kelompok indikator kinerja kegiatan (*input, output, outcome, benefit dan impact*).
- d. Pada akuntabilitas kinerja belum menyajikan capaian kinerja delapan tindakan karantina selama TA 2003 yang merupakan tupoksi Barantan. Selain itu cakupan kegiatan-kegiatan dan program yang dievaluasi dalam LAKIP belum *representatif* untuk menggambarkan kinerja Barantan. Pada akuntabilitas keuangan belum menggambarkan tingkat ekonomis, efisiensi, efektivitas dan ketaatan pada peraturan/perundangan yang berlaku.
- e. Dari hasil penyajian terhadap 6 kegiatan yang di kelola Eselon II (Pusat) lingkup Barantan, rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan *input* 68 %, *output* 72 %, *outcome* 52 %, *benefit* 0 % dan *impact* 0 %,

sedangkan rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 54 % atau kategori **sangat kurang berhasil**. Belum maksimalnya pencapaian indikator khususnya *output* adalah disebabkan kualitas *output* belum sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Juklak/Juknis, sedangkan rendahnya *outcome* adalah disebabkan pada saat pemeriksaan *output* yang dihasilkan belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan. Selain itu pada kegiatan belum dapat dilihat *outcome, benefit, impact* dalam satu tahun melainkan baru dapat dilihat pada tahun-tahun berikutnya, sehingga capaian kinerja masih nihil (0 %).

5.2 Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dari hasil analisis tersebut, penulis menyampaikan beberapa konstruktif saran yang hendaknya tidak dianggap sebagai hal yang negatif, akan tetapi hendaknya dapat sebagai masukan yang dapat membangun demi kepentingan instansi Barantan, Departemen Pertanian maupun pihak lainnya yang terkait, yaitu:

- a. Pimpinan Badan Karantina Pertanian dan seluruh unit Eselon II lingkup Barantan agar menerapkan SAKIP dan sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999 dan menyusun Renstra secara partisipatif serta disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan *stakeholders* dan memanfaatkannya dalam penyusunan kegiatan keproyekan dan evaluasi kinerja. Selain

itu setiap unit kerja Eselon II keatas agar menyusun LAKIP sesuai dengan pedoman/standar yang ditetapkan LAN (SK No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

- b. Dalam pelaksanaan TA 2005 merancang sistem pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, termasuk penetapan bobot atas kegiatan, program dan kebijakan sehingga pada akhir tahun anggaran dapat dinilai capaian kinerja instansi.
- c. Dalam penyusunan akuntabilitas kinerja, menyajikan capaian kinerja delapan tindakan karantina (8P) yang merupakan Tupoksi Barantan. Selain itu agar pembahasan pada setiap program/kegiatan dapat memberikan informasi tentang tingkat ekonomis, efisiensi, efektivitas/kegiatan serta ketaatan pada peraturan, perundangan yang berlaku. Hal ini karena capaian kinerja kegiatan yang secara umum masuk dalam kategori sangat kurang berhasil, sehingga perlu mengoptimalkan kinerja *output* dan *outcome*. Untuk memperoleh capaian kinerja kegiatan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan

Tap MPR RI Nomor XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Inpres RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tap MPR Nomor II/ MPR/ 1999 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Keputusan Kepala LAN Nomor 589/ IX/ 6/ Y/ tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

SK. Menteri Pertanian Nomor 354.1/ Kpts/ OT.210/ 6/ 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian No. 01/ Kpts/ OT. 210/ 1/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

Keputakaan

B. Ghartey. 1987. *Crisis, Accountability and Development in the Third World*, London, disadur dari Modul Sosialisasi SAKIP LAN dan BPKP.

Oxford Advance Learner's Dictionary, Oxford University Pres. 1989. disadur dari Modul Sosialisasi SAKIP LAN dan BPKP.

Maleh, S.H dan Rekan, *Modul Sosialisasi LAN dan BPKP*.

Pedoman Penyusun Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta, LAN dan BPKP. 2003.

Modul 1 dari 5, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta, LAN, 2000.

Modul 2 dari 5, *Perencanaan Stratejik Instansi Pemerintah*, Jakarta, LAN dan BPKP. 2000.

Modul 3 dari 5, *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta, LAN dan BPKP. 2000.

Modul 4 dari 5, *Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta, LAN dan BPKP. 2000.

Modul 5 dari 5, *Penyusunan Laporan AKIP*, Jakarta, LAN dan BPKP, 2000.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : Lamsihar Silalahi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 18 Agustus 1979
Agama/ Kebangsaan : Katholik / Indonesia
Alamat : Jl. Pembina No. 19 RT. 015 RW. 02
Cipinang Muara Jakarta Timur - 13420

B. PENDIDIKAN

1. SD NEGERI 03 Jakarta, Berijasa Tahun 1991
2. SMP Putra Harapan Jakarta, Berijasa Tahun 1995
3. SMA Negeri 107 Jakarta, Berijasa Tahun 1998
4. Universitas Kristen Indonesia Tahun 1998-2002
5. Universitas Darma Persada Program Strata I Fakultas Ekonomi
Jurusan Akuntansi Angkatan 2002- Sekarang

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KARANTINA PERTANIAN



